

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Bunaken di provinsi Sulawesi Utara. Masalah utama dalam penelitian adalah setelah pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan kebijakan pembentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB) ternyata Taman Nasional Bunaken belum juga tertangani dengan baik. Sebagai kawasan wisata yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah, angka kunjungan wisatawan ke kawasan ini semenjak tahun 2009 justru semakin menurun, sementara sebagai kawasan konservasi, kondisi kawasan ini justru semakin buruk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sumber persoalan adalah pada tidak sesuainya bentuk organisasi DPTNB dengan persoalan yang dihadapi. DPTNB hanyalah merupakan lembaga kolaborasi yang tugasnya hanya mengkoordinasikan program antar instansi. Bentuk organisasi justru mengakibatkan sikap kontra produktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada dukungan dari pemangku kepentingan terhadap program-program yang seharusnya dilakukan.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah bentuk organisasi tanpa hierarki dan kewenangan yang tegas menjadi penyebab utama tidak berjalannya program-program yang telah ditetapkan di dalam organisasi. Ketiadaan hierarki dan pembagian tugas yang jelas, menyebabkan seluruh anggota yang berada di dalam organisasi menjadi tidak memiliki komitmen terhadap keputusan-keputusan organisasi. Karena ternyata di dalam organisasi seperti ini, tidak ada kewajiban bagi para anggotanya untuk melaksanakan berbagai keputusan atau program yang ditetapkan oleh organisasi. Temuan lainnya bahwa organisasi tanpa hierarki dan pembagian kewenangan yang tegas juga memberikan pengaruh buruk terhadap respons atau disposisi para anggota di dalam organisasi.

Kata kunci : Organisasi, koordinasi, hirarkhi, kolaborasi, dan disposisi